

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri, Dan Mlonggo Kabupaten Jepara berjumlah 30 desa yang merupakan satuan otonomi daerah tingkat paling dasar. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Data Desa Objek Penelitian

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1.	Kembang	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Jingtotan2. Desa Kancilan3. Desa Tubanan4. Desa Kaliaman5. Desa Pendem6. Desa Dudakawu7. Desa Sumanding8. Desa Bucu9. Desa Cepogo10. Desa Dermolo11. Desa Balong
2.	Bangsri	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Banjaran2. Desa Banjaragung3. Desa Srikandang4. Desa Papasan5. Desa Wedelan6. Desa Kedung Leper7. Desa Tengguli8. Desa Kepuk9. Desa Guyangan10. Desa Bangsri11. Desa Jeruk Wangi12. Desa Bondo
3.	Mlonggo	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Jambu Timur

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Desa Sekuro 3. Desa Srobyong 4. Desa Jambu Barat 5. Desa Suwawal 6. Desa Mororejo 7. Desa Sinanggul
--	---

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dalam hal pengelolaan keuangan, desa yang menjadi objek penelitian sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) namun belum maksimal karena faktanya masih harus menyetor LPJ dalam bentuk *hard copy*. Disinilah peran dari Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pengendalian Internal sangat penting karena berhubungan dengan pembuatan LPJ untuk kemudian dilaporkan kepada kecamatan secara tepat waktu.

4.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa atau sering disebut dengan Petinggi yang berjumlah 30 orang dari 30 desa yang terdapat di Kecamatan Kembang, Bangsri, dan Mlonggo Kabupaten Jepara. Sebagai seorang Kepala Desa/ Petinggi dituntut mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga diharapkan mampu memimpin Warga dan Desanya untuk lebih maju serta berkembang. Kepala Desa/ Petinggi bertanggungjawab penuh atas Satuan Kerja Perangkat Desa sehingga seorang Kepala Desa/ Petinggi secara tidak langsung juga menerapkan prinsip pengendalian internal. Untuk data responden bisa dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Data Responden

Umur	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Jabatan
54	S1	1	Petinggi Mororejo
48	S2	3	Carik Sinanggul
51	SMA	2	Petinggi Jambu
56	S1	3	Petinggi Sekuro
50	S1	1	Petinggi Jambu Timur
61	SMA	1	Petinggi Srobyong
61	SMA	2	Petinggi Suwawal
52	SMA	1	Petinggi Bondo
38	S1	2	Petinggi Kedung Leper
51	S1	1	Petinggi Wedelan
51	S1	1	Petinggi Jeruk Wangi
42	S1	2	Petinggi Bangsri
35	D3	1	Petinggi Kepuk
46	SMA	1	Petinggi Guyangan
51	S1	1	Petinggi Tengguli
28	S1	1	Carik Papasan
49	SMA	1	Petinggi Banjaran
50	D2	2	Petinggi Banjaragung
35	SMA	1	Petinggi Srikandang
61	SMA	1	Petinggi Balong
57	SMA	1	Pejabat Petinggi Dermolo
50	SMA	2	Petinggi Cepogo
43	SMA	2	Petinggi Bucu
65	SMP	3	Petinggi Sumanding
51	SMA	2	Petinggi Dudakawu
55	SMA	3	Petinggi Pendem
54	SMA	1	Petinggi Jinggotan
55	S1	2	Petinggi Kancilan
59	S2	1	Petinggi Kaliaman
46	S1	1	Petinggi Tubanan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh Kepala Desa/ Petinggi adalah laki laki dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Rentan Umur :

Tabel 8
Frekuensi dan Presentase Umur

Umur	Frekuensi	%
21 – 30	1 Orang	3%
31 – 40	3 Orang	10%
41 – 50	9 Orang	30%
51 – 60	13 Orang	43%
> 60	4 Orang	13%
Total	30 Orang	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

b. Pendidikan Terakhir :

Tabel 9
Frekuensi dan Presentase Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	%
SD	0 Orang	0%
SMP	1 Orang	3%
SMA	14 Orang	47%
PENDIDIKAN TINGGI	15 Orang	50%
Total	30 Orang	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

c. Masa Jabatan :

Tabel 10
Frekuensi dan Presentase Masa Jabatan

Masa Jabatan	Frekuensi	%
< 5 Tahun	17 Orang	57%
5 – 10 Tahun	9 Orang	30%
> 10 Tahun	4 Orang	13%
Total	30 Orang	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Untuk menjadi seorang Kepala Desa atau Petinggi, jelas saja dibutuhkan pengalaman dan wawasan yang luas mengenai profil daerah yang di pimpinnya. Namun itu tidak menjadi masalah karena seorang Kepala Desa tidak bekerja sendiri dalam mengelola suatu daerah. Oleh karena itulah Kepala Desa merupakan responden yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan Kepala Desa bisa dikatakan sebagai *top manager* dalam sebuah entitas yang mengerti betul kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan untuk berkembangnya suatu entitas tersebut. Secara tidak langsung Kepala Desa juga melaksanakan Pengendalian Internal sebagai langkah atau upaya dalam rangka pengawasan kinerja serta pencegahan pelanggaran yang dapat disebabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa lain di bawahnya.

4.3 Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap variabel – variabel penelitian yaitu Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan suatu individu dalam mengolah daya pikir dan daya fisik secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan sebuah organisasi. Hasil analisis deskriptif pada data variabel Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Manusia

No.	Pertanyaan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila dalam kelurahan memiliki staf yang berkompentensi bagian keuangan/akuntansi dalam jumlah yang cukup.	23	76,7	7	23,3	0	0	0	0	0	0
2.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila staf bagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.	20	66,7	10	33,3	0	0	0	0	0	0
3.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.	19	63,3	11	36,7	0	0	0	0	0	0
4.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0
5.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila uraian tugas subbagian keuangan/ akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0
6.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0
7.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila bagian keuangan/akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.	13	43,3	17	56,7	0	0	0	0	0	0

8.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila bagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.	20	66,7	10	33,3	0	0	0	0	0	0
9.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas.	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0
10.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.	17	56,7	13	43,3	0	0	0	0	0	0
Rata - rata		61,65 %		38,35 %		0 %		0 %		0 %	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui sebagian besar responden memilih sangat setuju bahwa Sumber Daya Manusia harus memiliki kompetensi yang baik di bidang akuntansi, pendidikan yang tinggi, mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki sumber daya operasional pendukung yang cukup dengan presentase rata-rata sebesar 61,65 %.

4.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi baik berupa data, suara, gambar, dan video yang di proses secara komputasi (komputer) dalam bentuk elektronik. Tujuan dari suatu teknologi yang digunakan adalah untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan

pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis deskriptif pada data variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Pertanyaan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila dalam melaksanakan tugas subbagian akuntansi/ keuangan memiliki komputer yang cukup.	21	70	9	30	0	0	0	0	0	0
2.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila jaringan internet terpasang di unit kerja secara <i>Local Area Networt (LAN)</i> atau <i>Wide Area Networt (WAN)</i> .	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0
3.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila jaringan internet terpasang dan dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.	19	63,3	11	36,7	0	0	0	0	0	0
4.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	18	60,0	11	36,7	0	0	1	3,3	0	0
5.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	14	46,7	16	53,3	0	0	0	0	0	0

6.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.	16	53,3	14	46,7	0	0	0	0	0	0
7.	Setujukah Bpk/Ibu, Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.	14	46,7	16	53,3	0	0	0	0	0	0
8.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila peralatan yang usang/ rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.	11	36,7	19	63,3	0	0	0	0	0	0
Rata - rata		56,65 %		43,35 %		0 %		0 %		0 %	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui sebagian besar responden memilih sangat setuju bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah Desa harus memiliki komputer yang cukup, terhubung dengan jaringan LAN/ WIFI, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mengolah data keuangan, menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemeliharaan yang baik dengan presentase rata-rata sebesar 56,65 %.

4.3.3 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga aset atau kekayaan perusahaan dengan upaya mendorong ketaatan manjerial dan memastikan bahwa semua peraturan atau regulasi perusahaan dapat dipatuhi dengan baik. Hasil analisis deskriptif pada data variabel Pengendalian Internal dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Tanggapan Responden Tentang Pengendalian Internal

No.	Pertanyaan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila bagian keuangan/akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban	18	60	12	40	0	0	0	0	0	0
2.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila daftar rekening (<i>chart of account</i>) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.	16	53,3	13	43,3	1	3,3	0	0	0	0
3.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.	16	53,3	11	36,7	2	6,7	1	3,3	0	0
4.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.	19	63,3	11	36,7	0	0	0	0	0	0
5.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0
6.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.	13	43,3	17	56,7	0	0	0	0	0	0
7.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu sebelum di distribusikan.	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0

8.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila sistem akuntansi yang ada memungkinkan untuk audit.	12	40	17	56,7	1	3,3	0	0	0	0
9.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.	16	53,3	13	43,4	1	3,3	0	0	0	0
10.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi pimpinan.	13	43,3	15	50,0	1	3,3	1	3,3	0	0
Rata - rata		51,65 %		46,7 %		1,65 %		0 %		0 %	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui sebagian besar responden memilih sangat setuju bahwa Pengendalian Internal dalam sebuah Desa harus memiliki standar akuntansi yang sesuai dengan undang-undang pemerintahan, desa memiliki rekening mandiri dan digunakan dengan semestinya, semua transaksi dicatat serta harus mempunyai bukti yang valid dan sah, dan terdapat pemisahan tugas dalam rangka penyelenggaraan APBD dengan presentase rata-rata sebesar 51,65 %.

4.3.4 Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa ahli tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter (Fahmi,

2012). Hasil analisis deskriptif pada data variabel Ketepatanwaktuan Pelaporan

Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.	15	50,0	13	43,3	2	6,7	0	0	0	0
2.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila laporan-laporan berikut disediakan secara sistematis dan teratur mulai dari Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Semester, Laporan Tahunan.	12	40,0	16	53,3	1	3,3	1	3,3	0	0
3.	Setujukah Bpk/Ibu, apabila laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur mulai dari Laporan realisasi semester pertama, Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.	13	43,3	17	56,7	0	0	0	0	0	0
Rata - rata		43,3 %		53,3 %		4,4 %		0 %		0 %	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui sebagian besar responden memilih setuju bahwa Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa harus tersedia ketika diminta, disediakan secara teratur dan sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan presentase rata-rata sebesar 53,3 %.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika Nilai r hitung (*corrected total correlation*) lebih besar dari nilai r tabel (*r product moment*) pada 0,05 (Ghozali, 2012). Hasil uji Validitas dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0,599	0,3610	valid
	X1.2	0,717	0,3610	valid
	X1.3	0,637	0,3610	valid
	X1.4	0,521	0,3610	valid
	X1.5	0,659	0,3610	valid
	X1.6	0,742	0,3610	valid
	X1.7	0,729	0,3610	valid
	X1.8	0,761	0,3610	valid
	X1.9	0,668	0,3610	valid
	X1.10	0,621	0,3610	valid
Pemanfaatan Teknmologi Informasi (X2)	X2.1	0,761	0,3610	valid
	X2.2	0,915	0,3610	valid
	X2.3	0,882	0,3610	valid
	X2.4	0,828	0,3610	valid
	X2.5	0,822	0,3610	valid

	X2.6	0,809	0,3610	valid
	X2.7	0,801	0,3610	valid
	X2.8	0,682	0,3610	valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,827	0,3610	valid
	X3.2	0,681	0,3610	valid
	X3.3	0,738	0,3610	valid
	X3.4	0,623	0,3610	valid
	X3.5	0,815	0,3610	valid
	X3.6	0,749	0,3610	valid
	X3.7	0,782	0,3610	valid
	X3.8	0,641	0,3610	valid
	X3.9	0,637	0,3610	valid
	X3.10	0,746	0,3610	valid
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa (Y)	Y.1	0,867	0,3610	valid
	Y.2	0,912	0,3610	valid
	Y.3	0,910	0,3610	valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 15, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Serta Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa memiliki status valid karena r hitung (*corrected total correlation*) lebih besar dari nilai r tabel (*r product moment*) pada 0,05, yaitu 0,3610.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach's alpha $> 0,6$ dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach's alpha $< 0,6$. (Ghozali, 2012). Hasil uji Reliabilitas dari variabel Sumber Daya Manusia,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria Alpha	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,860	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,924	0,60	Reliabel
Pengendalian Internal	0,893	0,60	Reliabel
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa	0,866	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

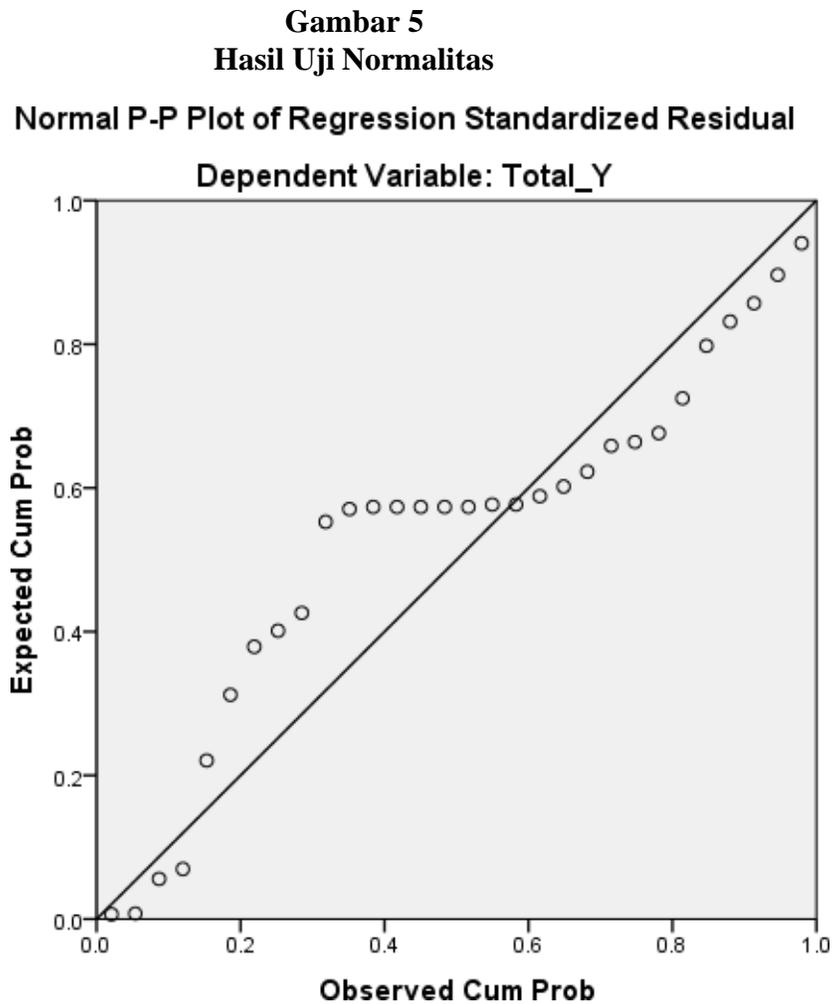
Berdasarkan tabel 16, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Serta Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa memiliki status reliabel (layak) dikarenakan cronbach's alpha $> 0,6$.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas. Hasil uji Normalitas dari

variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut :



Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dalam uji normalitas data primer kuesioner responden dapat dilihat dalam gambar 5 bahwa penyebaran data di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian maka regresi tersebut memenuhi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Sebuah regresi tidak terdapat Multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$. Hasil uji Multikolinearitas dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
Sumber Daya Manusia	0,277	3,608
Pemanfaatan Teknmologi Informasi	0,199	5.016
Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa	0,247	4,055

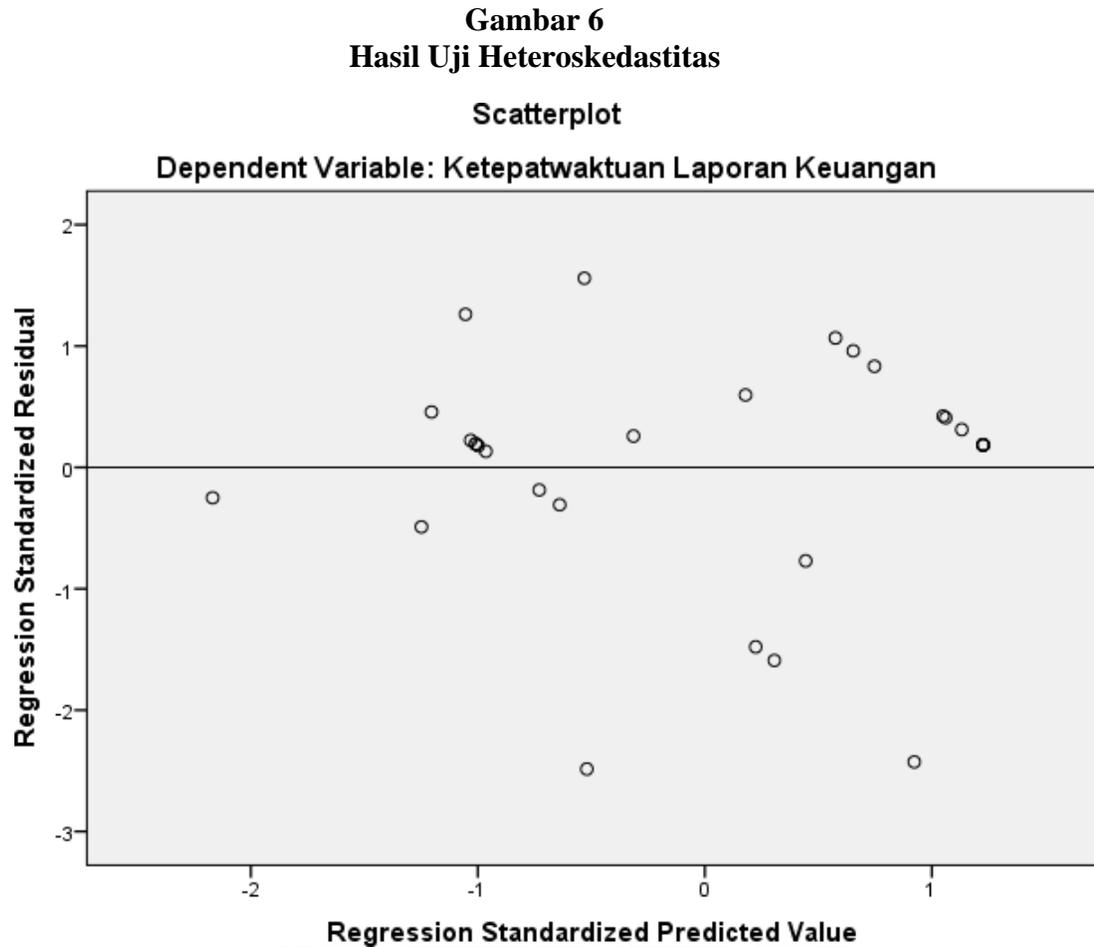
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dengan melihat hasil uji multikolinieritas dari tabel 17 di atas, maka penelitian ini tidak terdapat Multikolinearitas dikarenakan nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, antara lain dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED pada sumbu Y. Hasil uji Heteroskedastisitas dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut :



Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dalam pengujian Heteroskedastitas data primer kuesioner responden dengan melihat gambar grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (dU) dan batas bawah (dL). Hasil uji Autokorelasi dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 18
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.672	.634	.993	2.184

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari Tabel 18 di atas, dapat dilihat bahwa untuk nilai batas atas dari data primer adalah sebesar 1,649 karena memiliki responden sebanyak 30 dan menggunakan 3 variabel independen. Kemudian untuk nilai Durbin Watson sebesar 2,184. Untuk perhitungannya adalah $dU < d < 4 - dU = 1,649 < 2,184 < 2,351$, jadi bisa diambil kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.

4.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2013) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Hasil uji Regresi dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.077	2.654		.029	.977		
Sumber Daya Manusia	-.030	.108	-.060	-.280	.782	.277	3.608
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.141	.122	-.289	-1.150	.261	.199	5.016
Pengendalian Internal	.438	.090	1.097	4.852	.000	.247	4.055

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan nilai *standardzise coefficients* pada tabel 19, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = - 0,060 (X1) - 0,289 (X2) + 1,097 (X3)$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Koefisien regresi pada variabel Sumber Daya Manusia (X1) sebesar – 0,060. Artinya variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Desa, sehingga apabila Sumber Daya Manusia semakin di tingkatkan akan menyebabkan penyampaian Laporan Keuangan Desa semakin tidak tepat waktu.
2. Koefisien regresi pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar – 0,289. Artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Desa, sehingga apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi semakin di tingkatkan akan menyebabkan penyampaian Laporan Keuangan Desa semakin tidak tepat waktu.
3. Koefisien regresi pada variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar 1,097. Artinya variabel Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Desa, sehingga apabila Pengendalian Internal semakin di tingkatkan maka akan menyebabkan penyampaian Laporan Keuangan Desa semakin tepat waktu.

4.4.5 Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2012) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Hasil uji t (Parsial) dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut :

Tabel 20
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.077	2.654		.029	.977
	Sumber Daya Manusia	-.030	.108	-.060	-.280	.782
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.141	.122	-.289	-1.150	.261
	Pengendalian Internal	.438	.090	1.097	4.852	.000

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

Dengan memperhatikan hasil uji t pada Tabel 20 Diketahui nilai t hitung sebesar -0,280 dengan nilai Signifikan 0,782. Dengan $df = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t \text{ hitung} = -0,280 < t \text{ tabel} = 2,055$.

Karena $t \text{ hitung} (-0,280) < t \text{ tabel} (2,055)$ dengan signifikan $0,782 > 0,05$

maka dapat disimpulkan bahwa H1 di tolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Berarti di tingkatkan atau tidak di tingkatkatnnya Sumber Daya Manusia maka tidak akan mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

Dengan memperhatikan hasil uji t pada Tabel 20 Diketahui nilai t hitung sebesar -1,150 dengan nilai Signifikan 0,261. Dengan $df = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t tabel = 2,055. Karena t hitung (-1,150) < dari t tabel (2,055) dengan signifikan 0,261 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 di tolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Berarti di tingkatkan atau tidak di tingkatkatnnya Pemanfaatan Teknologi Informasi maka tidak akan mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

Dengan memperhatikan hasil uji t pada Tabel 20 Diketahui nilai t hitung sebesar 4,852 dengan nilai Signifikan 0,000. Dengan $df = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t tabel = 2,055. Karena t hitung (4,852) > dari t tabel (2,055) dengan signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa H3 di terima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Berarti di tingkatannya Pengendalian Internal maka akan mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

4.4.6 Uji F (Simultan)

Uji hipotesis F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang di uji baik/ signifikan atau tidak baik/ non signifikan (www.statiskian.com). Hasil uji F (Simultan) dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.540	3	17.513	17.768	.000 ^b
	Residual	25.627	26	.986		
	Total	78.167	29			

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari hasil uji F pada tabel 21 di atas, dapat diketahui nilai dari F hitung sebesar 17,768 dengan nilai Signifikan 0,000. Dengan $df = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa F tabel = 2,980.

Karena F hitung (17,768) > dari F tabel (2,980) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa Variabel independen (Bebas) yaitu Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Variabel dependen (Terikat) yaitu Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa.

4.4.7 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh variabel lainnya. Koefisien determinasi dinyatakan dalam (R^2). koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2007). Hasil uji Koefisien Determinasi dari variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 22 sebagai berikut :

Tabel 22
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.820 ^a	.672	.634	.993	.672	17.768	3	26	.000	2.184

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Dapat dilihat pada tabel 22 hasil uji R square sebesar $0,634 \times 100 = 63,4\%$. Kesimpulannya Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal mempengaruhi besarnya perubahan terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa sebesar 63,4% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 36,6%.

4.5 Pembahasan

Dari hasil analisis regresi secara parsial antar variabel Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa terdapat hasil sebagai berikut :

4.5.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa

Hasil analisis regresi didapat variabel Sumber Daya Manusia (-0,280) berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa, sehingga apabila Sumber Daya Manusia ditingkatkan akan menyebabkan penyampaian Pelaporan Keuangan Desa semakin tidak tepat waktu. Dan hasil pengujian hipotesis didapat t hitung (-0,280) < dari t tabel (2,055) dengan signifikan $0,782 > 0,05$ berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa. Hal ini berarti Hipotesis 1 yang menyatakan : Diduga sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Desa, **di tolak**.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori Mathis dan Jackson (2006), yaitu Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah

organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dan hasil penelitian ini tidak mendukung dari penelitian Sukirman dkk (2013) dan Arifani (2014) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut di antaranya :

1. Meskipun rata-rata pendidikan dari Kepala Desa/ Petinggi adalah lulusan Perguruan Tinggi, namun bukan lulusan akuntansi sehingga tidak memahami betul sistem pengelolaan pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Dilihat dari faktor usia, rata-rata Kepala Desa/ Petinggi sudah berusia di atas 50 tahun sehingga meskipun ada Sosialisasi/ Seminar yang di ikuti mengenai cara pengelolaan pelaporan keuangan yang baik dan benar, akan sulit untuk bisa langsung memahami dan menerapkannya secara cepat dan tepat.
3. Dalam sistem Pelaporan Keuangan Desa yang awalnya menggunakan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 sekarang di ubah menjadi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 sehingga terjadi perubahan standar yang mengakibatkan penyesuaian baru dalam penyusunan laporan keuangan desa yang tidak bisa diterapkan secara cepat serta membutuhkan waktu.

4.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa

Hasil analisis regresi didapat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (-1,150) berpengaruh negatif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa, sehingga apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi ditingkatkan akan menyebabkan penyampaian Pelaporan Keuangan Desa semakin tidak tepat waktu. Dan hasil pengujian hipotesis didapat t hitung (-1,150) < dari t tabel (2,055) dengan signifikan $0,261 > 0,05$ berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Hal ini berarti Hipotesis 2 yang menyatakan : Diduga Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa, **di tolak**.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori Lucas (2000), yaitu Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Dan hasil penelitian ini tidak mendukung dari penelitian Trisaputra (2013) dan Nihayah (2015) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut di antaranya :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengolah data keuangan, akan tetapi hanya dimanfaatkan semisal untuk

bermain media sosial, game, atau bahkan tidak di gunakan sama sekali (menganggur) bisa di karenakan rusak, *error*, atau faktor lainnya.

2. Satuan Kerja Perangkat Desa yang terkait tidak dapat memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada dengan baik sehingga lebih memilih untuk melimpahkan tugas kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengerjakan Laporan Keuangan tersebut.
3. Meskipun sistem keuangan sudah secara online akan tetapi masih harus melampirkan laporan keuangan secara *hardcopy*. Padahal tujuan diadakannya sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi langsung secara online adalah agar bisa dilaporkan secara tepat waktu.

4.5.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa

Hasil analisis regresi didapat variabel Pengendalian Internal (4,862) berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa, sehingga apabila Pengendalian Internal ditingkatkan akan menyebabkan penyampaian Pelaporan Keuangan Desa semakin tepat waktu. Dan hasil pengujian hipotesis didapat t hitung (4,862) > dari t tabel (2,055) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ berarti terdapat pengaruh signifikan antara Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa. Hal ini berarti Hipotesis 3 yang menyatakan : Diduga Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Desa, **di terima**.

Hasil penelitian sejalan dengan teori Hery (2013) yaitu Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Dan hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Sukri (2017) dan Nihayah (2015) yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut di antaranya :

1. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa yang terkait termasuk dalam hal pengelolaan Pelaporan Keuangan Desa merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa/ Petinggi, sehingga Kepala Desa/ Petinggi melaksanakan pengawasan secara langsung yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian internal.
2. Semua rancangan kegiatan dari tiap divisi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Desa tidak akan dapat di laksanakan jika tidak ada ototrisasi dari Kepala Desa/ Petinggi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian internal.